

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bidang keuangan dengan tugasnya sebagai *go-between foundation*, bidang keuangan memegang peranan penting dalam membentengi dan menggerakkan perekonomian suatu bangsa (Wanda, 2019). Bidang keuangan layak memiliki predikat baik guna mendorong perekonomian menuju masa depan unggul. Kepercayaan masyarakat pada umumnya berperan penting dalam mensurvei penguasaan aset pengurus dalam membantu kelancaran individu membutuhkan aset dalam memenuhi kewajibannya (Noviyanti, 2019). Salah satu organisasi moneter bank ialah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). BPR digambarkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai bank melakukan kegiatan usaha secara adat atau selaras standar syariah namun tidak mewariskan administrasi angsuran dalam pelaksanaan fungsinya. Menurut Kasmir (2017), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ialah lembaga keuangan bank mewarisi aset dari masyarakat umum sebagai simpanan, dana cadangan, dan catatan lain sebanding, kemudian, kemudian, menginvestasikan kembali uang itu sebagai uang muka kredit.

BPR termasuk terdampak pandemi Covid-19, sebagian besar dana cadangan dialihkan sebagai uang muka kepada pelaku UMKM terdampak pandemi, sehingga bunga kredit perbankan rendah. Selain itu, perbankan juga masih berhati-hati dalam memperluas kredit karena mereka memproyeksikan perekonomian masih belum membaik. Di tengah momok saat ini, perkembangan penyebaran cadangan kredit BPR, baik kemajuan bisnis maupun pembelanja,

menghadirkan bahaya mengesankan. Pasalnya, pandemi Covid-19 telah memapas lingkungan kerja, dengan Covid-19 memapas sekitar 2,8 juta tenaga kerja di Indonesia. Konsekuensinya, banyak tenaga ahli di-PHK, baik formal maupun casual, kehilangan gaji dan tunjangan, berdampak pada bidang usaha dan UMKM diawasi oleh para pelaku usaha. Jadi ini akan memiliki kontak buruk dengan ketidakberdayaan pemegang rekening atau peminjam guna bertanggung jawab guna membayar kembali uang diperoleh. Peluang ini juga akan melahirkan kredit buruk. Dimana kemajuan terjadi pada kredit macet terus berkembang selama ini akan berdampak positif terhadap proporsi hazard usaha bank diperkirakan bahaya kredit macet (Non Performing Loan) di BPR.

Kondisi moneter saat ini sedang tidak sehat, mewariskan informasi kepada bank update terhadap item dan administrasi di bank tidak diikuti perkembangan bersifat bahaya para eksekutif dapat melahirkan berbagai masalah bagi bank dan sistem moneter secara keseluruhan (Dwita Rizki, 2019). Suatu bank layak kokoh apabila dapat memenuhi kapasitasnya dengan baik, dapat menjaga dan menjaga kepercayaan masyarakat, memimpin intermediasi dan membantu kelancaran lalu lintas angsuran, serta dimanfaatkan oleh otoritas publik guna melakukan berbagai strategi, khususnya strategi keuangan (Permana, 2012: Dwita Rizki, 2019). Evaluasi kecukupan bank sangat penting dalam mewariskan gambaran tentang status bank saat ini, terutama bagi individu dan eksekutif. Menjamin sumber daya para eksekutif, bantuan brilian, bekerja pada kesan dan kepercayaan bank, serta memperluas keterusterangan dan tanggung jawab bank, bank diandalkan guna dapat melakukan petaksiran kesejahteraannya secara andal sehingga cenderung menjadi diwakilkan kepada individu bank diinvestasikan (Mulyadi, 2017).

Terlebih lagi, petaksiran tingkat kecukupan bank dapat diamati dari ikhtisar fiskalnya, yaitu laporan mengungkap bagaimana keadaan keuangan organisasi saat ini atau pada suatu saat selaras jadwal (Kasmir, 2017). Tingkat kecukupan bank diatur dalam Pedoman Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 tentang Petaksiran Tingkat Kesehatan Bank, khususnya dengan memakai pendekatan Risk Based Bank Rating, baik secara eksklusif maupun secara terkoordinasi, dengan tingkat petaksiran menaungi variabel pendukung : profil bahaya (hazard profile), great corporate administration (GCG), produktivitas (benefit); dan (modal) atau dipotong sebagai strategi RGEC, prosedur ini pada dasarnya sejak 1 Januari 2012 mensurvei kecukupan bank guna periode berakhir Desember 2011 menggantikan teknik CAMELS.

Ibarat diterangkan oleh Persatuan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Otoritas Jasa Keuangan, pada Januari 2015 ada 132 BPR, mengingat 23 di antaranya guna Kabupaten Gianyar. Selanjutnya, Kabupaten Gianyar memiliki jumlah BPR terbesar kedua di Bali, setelah Kabupaten Badung, menerangkan potensi pemberian kredit kepada daerah di Kabupaten Gianyar sangat solid. Oleh karena itu, penting guna bekerja pada presentasi BPR. Presentasi pekerja BPR di Kabupaten Gianyar cukup menonjol guna diperhatikan mengingat pentingnya BPR sebagai credit divert bagi UMKM di Kabupaten Gianyar, ada keajaiban pelaksanaan perwakilan mendapat perhatian publik. di salah satu BPR di Kabupaten Gianyar yaitu BPR Suryajaya Ubud. BPR Suryajaya Ubud ialah BPR telah bekerja mulai sekitar tahun 1991 dan mempekerjakan 50 orang. Pada Desember 2018, seorang teller sebelumnya berinisial NWPLD mencuri 850 juta rupiah dari klien, ibarat didapat situs berita Radarbali pada Mei

2021. Kesalahpahaman ini terungkap setelah pelanggan Made Suryana mengumumkan pertukaran palsu dalam catatannya sendiri. Apalagi, pada Maret 2020 terungkap kasus lain terkait penghapusan uang Rp 2 miliar dari catatan seorang klien bernama Luh Indriani tanpa sepengetahuan klien. Karena jumlah sangat besar guna situasi tersebut, klaim masih dalam tahap awal masih berlanjut. Tersirat variasi tanda antara slip penarikan menjadi bukti keadaan dan tanda tangan termohon, ketidaktahuan penggugat atas pertukaran terjadi via PC-nya, dan berbagai kejanggalan terus ditemukan, tidak adanya keterangan termohon tentang Pertukaran terjadi via PC-nya, terdakwa didakwa atas penyelewengan kasus sebelum menjadi perwakilan jangka panjang di BPR Suryajaya Ubud, dan administrasi BPR tidak salah lagi menyembunyikan realitas kasus saat ini. tahap pendahuluan sekarang.

Pada salah satu BPR di Kabupaten Gianyar dengan NPL (*Non Performing Loan*) tinggi pada tahun 2018 – 2020. Hal ini dapat diamati via tingginya taksir rasio NPL (*Non Performing Loan*) pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Rasio NPL pada BPR di Kabupaten Gianyar

NO	NAMA BPR	NPL 2018	NPL 2019	NPL 2020
1	PT. BPR Tish	16, 51%	18, 5%	19, 85%
2	PT. BPR Sadhu Artha	2, 67%	2, 81%	3, 94%
3	PT. BPR Sukawati Pancakanti	7, 32%	8, 94%	6, 42%
4	PT. BPR Gianyar Parthasedana	10, 83%	8, 06%	7, 85%
5	PT. BPR Bank Daerah Gianyar	2, 21%	2, 38%	2, 69%
6	PT. BPR Suryajaya Ubud	19, 68%	16, 09%	12.89%
7	PT. BPR suadana	6, 51%	10, 14%	8, 38%
8	PT. BPR Aruna Nirmala Duta	1, 16%	1, 28%	3, 60%
9	PT. BPR Angsa Sedana Yoga	20, 30%	22, 80%	19, 61%
10	PT. BPR Mulia Wacana	1, 80%	0, 45%	1, 28%
11	PT. BPR Bali Dewata	2,15%	1,69%	4,13%

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Mengikuti tabel 1.1 di atas, dapat diamati pada tahun 2018 sampai 2020 pada salah satu BPR di Kabupaten Gianyar, dari sisi profil risiko memiliki rasio NPL tertinggi berada pada peringkat teratas yaitu PT. BPR Angsa Sedana Yoga pada tahun 2018 sebesar 20,30% meningkat di tahun 2019 menjadi 22,80% dan pada tahun 2020 menurun menjadi 19,61% dan PT. BPR Suarjaya Ubud di peringkat kedua dengan taksir rasio NPL (*Non Performing Loan*) pada tahun 2018 sebesar 19,68%, pada tahun 2019 menurun menjadi 16,09% dan pada tahun 2020 menurun menjadi 12,89%. Peringkat dengan taksir rasio tertinggi tidak dinyatakan sebagai kemajuan terhadap kinerja suatu bank, apabila semakin tinggi taksir rasio NPL (*Non Performing Loan*), maka semakin tinggi risiko kerugian akan terjadi sehingga akan mengakibatkan kegagalan di alami debitur dalam memenuhi kewajibannya pada bank tersebut (Wanda, 2019).

Hipotesis penandaan dipilih sebagai hipotesis luar lazim dalam ulasan ini. Ibarat diterangkan oleh (Michel Spence, 1973; Tri Destiana, 2019) hipotesis sinyal menjelaskan mengapa sebuah organisasi layak memiliki kecenderungan guna menyampaikan data baik kepada pihak luar. Data memegang peranan penting karena data pada dasarnya meneruskan data, catatan, atau penggambaran kondisi masa lalu, saat ini, dan masa depan guna ketahanan suatu organisasi dan bagaimana pasar organisasi tersebut, terutama data menggambarkan kecukupan bank. mengasumsikan bagian penting bagi pendukung keuangan dan pengelola uang.

Pemeriksaan ini ialah perbaikan dari penelitian sebelumnya dipimpin oleh Saleo (2017). Teknik logis dan tujuan eksplorasi digunakan dalam investigasi masa lalu memakai pendekatan CAMELS ialah kontras antara ulasan ini dan

pemeriksaan sebelumnya, sedangkan tinjauan ini memakai strategi RGEC dan fokus pemeriksaan di PT. Bank Mandiri TBK, sedangkan tujuan eksplorasi ini ialah BPR di Kabupaten Gianyar. Menyinggung pentingnya hazard board, pendekatan RGEC (Risk Profiles, Good Corporate Governance, Earnings, Capital) ialah teknik petaksiran bahaya tersusun, proporsionalitas, materialitas, besar, ekstensif dan terorganisir (Ikatan Bankir Indonesia, 2016). Strategi RGEC berperan penting dalam menentukan kecukupan suatu bank. Gobel (2016) melantaskan "tantangan dalam ekonomi mengarah pada keadaan darurat terkait uang terus-menerus disebabkan oleh kekecewaan bank guna mewarisi validitas menurut klien". Kepercayaan nasabah terhadap bank sangat penting, mengingat nasabah sebagai individu menyisihkan uangnya di bank membutuhkan rasa aman dalam menyimpan uang dalam jumlah tertentu, baik sebagai simpanan maupun sebagai simpanan. Maka dengan ditemukannya ketidakamanan pada proporsi terjadi pada BPR di Kabupaten Gianyar selama tahun 2018 - 2020, maka para analis BPR di Kabupaten Gianyar tertarik guna berkonsentrasi pada kecukupan bank akan didefinisikan dalam sebuah makalah logis dengan judul **"ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK MENGIKUTI METODE RGEC (RISK PROFILE, GOOD CORPORATE GOVERNANCE EARNING DAN CAPITAL) PADA BPR DI KABUPATEN GIANYAR"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Mengikuti latar masalah telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat di identifikasikan sebagai berikut:

- 1) BPR termasuk terdampak pandemi Covid-19, dengan mayoritas dana tunai disalurkan dalam bentuk kredit kepada pelaku UMKM atau masyarakat umum terdampak pandemi.
- 2) Salah satu BPR di Kabupaten Gianyar memiliki taksir NPL sangat tinggi di tahun 2018.
- 3) Persyaratan Pemeriksaan Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan metode RGEC, serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 dan SE Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011.

1.3 Pembatasan Masalah

Mengikuti identifikasi masalah diatas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu dibatasi pada variabel dipakai di dalam penelitian ini yaitu: Analisis Tingkat Kesehatan Bank Mengikuti Metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning dan Capital*) Pada BPR di Kabupaten Gianyar.

1.4 Rumusan Masalah

Permasalahan diangkat oleh peneliti ialah bagaimana tingkat kesehatan bank pada BPR di Kabupaten Gianyar mengikuti permasalahan telah dibahas di latar belakang di Kabupaten Gianyar mengikuti metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning dan Capital*) periode 2018-2020?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan guna mengaplikasikan teknik RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, and Capital*) guna mengetahui tingkat kesehatan bank pada BPR di Kabupaten Gianyar.

1.6 Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat mewariskan manfaat mengikuti konteks, definisi masalah, dan tujuan penelitian sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Pemeriksaan ini diharapkan dapat mewariskan sumbangan spekulasi bagi kemajuan ilmu pembukuan, khususnya berkaitan dengan pemeriksaan kecukupan bank, sehingga penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber perspektif dan acuan guna mengkaji pemeriksaan komparatif oleh para analis masa depan.

2) Manfaat praktis

a. Guna Siswa

Via ujian ini, mahasiswa dapat bekerja pada pengaturan mereka, terutama dalam hal kecukupan bank dan dapat mengembangkan informasi diperoleh di perguruan tinggi. Hal ini juga dapat mempersiapkan mahasiswa dalam menyampaikan dan bergaul dengan responden dalam mengumpulkan informasi penelitian.

b. Guna Universitas Pendidikan Ganesha

Pemeriksaan ini dimaksudkan guna mewariskan referensi logis dapat digunakan sebagai tahap awal guna eksplorasi tambahan. Via tinjauan ini, para ahli dapat menyumbangkan spekulasi tentang penyelidikan kecukupan bank memakai teknik RGEC.

c. Guna BPR di Kabupaten Gianyar

Via pemeriksaan ini, dipercaya BPR Kabupaten Gianyar dapat mengamati tingkat kesejahteraan bank dengan membatasi terjadinya kredit macet. Temuan

dari tinjauan ini dapat digunakan sebagai bahan petaksiran guna membantu BPR di Kabupaten Gianyar guna lebih mengembangkan kerangka alokasi kredit mereka.

